

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, masalah pemberdayaan masyarakat nelayan dan strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir, menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan pembangunan nasional. Kurangnya perhatian terhadap hal-hal yang bersifat visioner dan tidak adanya perencanaan serta kebijakan pembangunan kemaritiman yang komprehensif, telah berakibat serius terhadap timbulnya berbagai masalah ekologi kelautan dan kerawanan sosial-ekonomi pada komunitas di kawasan pesisir. Salah satu persoalan konkrit tersebut adalah terjadinya konflik sosial antar kelompok masyarakat nelayan dalam memperebutkan sumber daya perikanan di wilayah mereka.

Salah satu daerah yang terjadi konflik sosial dalam memperebutkan sumber daya perikanan adalah kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, di kecamatan ini sebagian besar penduduknya yang tinggal di daerah pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan tersebut pada umumnya merupakan nelayan tradisional dengan menggunakan alat tangkap rawai, jaring ingsang, pukot pantai, langgai dan empang. Ikan-ikan hasil tangkapan mereka merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Dengan adanya nilai ekonomis yang tinggi dan didukung oleh kebijakan negara tentang modernisasi perikanan (*blue revolution*) telah mempengaruhi secara signifikan kondisi sumberdaya setempat. Para pemodal mulai

menggunakan peralatan modern dengan mengintroduksi sejenis jaring ingsang (*gill net*) yang dioperasikan di dasar laut dan dengan menggunakan alat pendeteksian keberadaan ikan, dan setiap menarik jaring dipastikan karang-karang yang tumbuh akan tersapu oleh jaring. Jaring ini dikenal dengan nama jaring batu atau jaring kurau. Sebagian besar nelayan dan pemilik (pengusaha) jaring batu berasal dari Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merbau, Kecamatan Bengkalis), Kabupaten Karimun (Tanjung Balai Karimun), yang merupakan usaha komersil skala ekspor yang umumnya berasal dari etnis Cina (*Tionghoa*). Baik jaring batu maupun jaring rawai keduanya sama-sama merupakan alat tangkap yang dioperasikan di dasar perairan. Jenis ikan yang menjadi sasaran juga relatif sama yaitu ikan-ikan yang dikenal aktif di dasar perairan seperti ikan kurau, malung, jenak, kerapu, pari dan kelampai. Ikan-ikan ini harganya sangat bagus di pasar lokal maupun ekspor.

Dampak lebih lanjut dimana semakin sulitnya memperoleh hasil tangkapan sehingga terjadinya peningkatan kesenjangan, penurunan pendapatan, dan kemiskinan, serta kurangnya kesejahteraan dikalangan masyarakat nelayan tradisional. Kelangkaan sumberdaya perikanan, khususnya untuk jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan pasar yang prospektif serta alat tangkap yang dipergunakan merupakan faktor yang dianggap sebagai sumber pemicu konflik dikalangan nelayan tersebut. Intensitas konflik ditentukan oleh tingkat perbedaan teknologi penangkapan yang dipergunakan oleh nelayan, keterbatasan teritorial distribusi spesies, dan jumlah nelayan yang memperebutkannya.

Konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern pertama kali terjadi tahun 1985, dimana satu unit kapal nelayan modern/jaring batu menabrak beberapa nelayan tradisional/nelayan rawai. Akibatnya bentrokan antar nelayan tersebut tidak dapat dihindari dan terus-menerus terjadi hingga saat ini.

Selama terjadinya konflik antara 1985 sampai awal 2004, tercatat 34 kali pertikaian/bentrokan. Kerugian yang dialami oleh kedua pihak tersebut cukup besar baik materi maupun non materi. Dipihak nelayan modern telah mengalami kerugian, sekitar 40 kapal jaring batu dibakar, dan beberapa orang luka-luka. Dipihak nelayan tradisional dua unit perahu motor ditangkap dan nelayannya disandera oleh nelayan modern, kehilangan dan kerusakan alat tangkap yang tidak terhitung lagi jumlahnya, serta beberapa orang nelayan tradisional terkena panah yang mengakibatkan perutnya robek dan harus dirawat di rumah sakit.

Walaupun ada usaha-usaha untuk penyelesaian konflik antar nelayan tersebut, akan tetapi konflik terus terjadi karena belum terungkapnya akar permasalahan yang melatarbelakanginya. Pemerintah telah berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan berbagai pendekatan komunikasi partisipasi dengan mengontrol, membina, mengawasi dan mendampingi masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peran komunikasi persuasif dalam menyelesaikan konflik antar nelayan tradisional dan nelayan modern di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Riau”.

1.2.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik nelayan tradisional dengan masyarakat nelayan modern di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
2. Bagaimana peran komunikasi persuasif dalam penyelesaian konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik nelayan tradisional dengan masyarakat nelayan modern di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
2. Bagaimana peran komunikasi persuasif dalam penyelesaian konflik antar masyarakat nelayan tradisional dengan masyarakat nelayan modern di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.